

BAB II

MEDIA MASSA, BERITA, WACANA

DAN PERNIKAHAN *SIRRI* DI INDONESIA

2.1 Media Massa

Media massa menjadi hasil karya budaya masyarakat manusia yang semakin berkembang dan meluas, sehingga keperluan berekspresi dan berkomunikasi tidak lagi memadai jika tidak dibantu instrumen yang sanggup menyampaikan pesan secara serentak, cepat, menjangkau luas. Instrumen itu adalah media massa.

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarluaskan pesan secara singkat, serempak, dan cepat kepada *audience* yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Istilah ini sering disingkat menjadi media (*id.wikipedia.org/wiki/Media_massa*).

Media massa menjadi hasil karya budaya masyarakat manusia yang semakin berkembang dan meluas, sehingga keperluan berekspresi dan berkomunikasi tidak lagi memadai jika tidak dibantu instrumen yang sanggup menyampaikan pesan secara serentak, cepat, menjangkau luas. Instrumen itu adalah media massa.

“Hidup ini dikendalikan oleh media massa”. Kalimat itu tak dapat kita pungkiri bila kita animo individu atau masyarakat terhadap berbagai program komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Belum lagi munculnya media *on-line* (internet). Sejak bangun tidur kemudian melakukan aktivitas harian hingga tidur kembali, kita tidak lepas dari terpaan atau menerpakan diri terhadap media massa. Dalam era kompetisi, era komunikasi, era perang citra atau lebih dikenal dengan era globalisasi, ubaran informasi menjadi hal yang tidak dapat dibendung lagi (Ardianto & Erdiyana, 2004 : vii).

Media massa acap disebut sebagai *the fourth estate* (kekuatan keempat) dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh suatu persepsi tentang pesan yang dapat dimainkan media dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial-ekonomi dan politik masyarakat (Sobur, 2009 : 30).

Berdasarkan kemungkinan yang dapat diperankan itu, media massa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan. Dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, media sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan media, terlebih dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan politik. Oleh karena itulah dalam konteks media massa sebagai institusi informasi, Karl Deutsch, menyebutnya sebagai “urat nadi pemerintah” (*the nerves of government*) (Sobur, 2009 : 31).

Bagi sebagian orang, media massa hanya berupaya menemukan kebenaran dan kenyataan itu. Lalu memberikannya kepada publik. Media massa dianggap tidak lebih dari “alat komunikasi” yang netral dan kosong dalam dirinya sendiri. Ia hanya berisi apabila diisi pesan oleh komunikator kepada pihak tertentu. Tampaknya oleh sebagian orang lagi, media massa tidak pernah dan tidak akan lebih banyak memberikan kebenaran atau “kenyataan apa adanya”. Ia lebih banyak menjanjikan mimpi dan fiksi (Sobur, 2009 : 33).

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*) (Uchjana, 2006 : 145).

Pers mengandung dua arti. Arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala : surat kabar, tabloid dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanya menunjuk pada media cetak berkala melainkan juga mencakup media elektronik auditif dan media elektronik audiovisual berkala yakni radio, televisi, film, dan media *on line* internet. Pers dalam arti luas inilah yang disebut sebagai media massa (Sumadiria, 2005 : 31).

Pengertian pers menurut UU Nomor 40 tahun 1999 adalah sebagai berikut : Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk

tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis aturan yang tersedia (UU No.40 tahun 1999).

Pers, khususnya pers Indonesia, bagaikan manusia dengan seribu wajah. Ketidakberpihakan yang seharusnya menjadi paradigma pers secara umum kini telah berubah menjadi keberpihakan. Penegakan keadilan dan kebenaran yang diidam-idamkan oleh Joseph Pulitzer berganti dengan penegakan kepentingan : hari ini menjadi “corong” kekuatan tertentu, besok merupakan “penyambung lidah” kekuatan lain (Pareno, 2003 : 64).

Seribu wajah yang menghiasi pers Indonesia itu bukan tanpa sengaja. Ada rekayasa yang dipraktekkan oleh banyak perusahaan media massa di negeri ini. Mulai dari perburuan berita, penetapan narasumber, kemudian penulisan berita sampai pada pemasaran surat kabar dan penayangan suatu mata acara (Pareno, 2003 : 65).

Sehubungan isi ekspresi manusia yang bermasyarakat adalah aneka macam, menyangkut segala bidang kehidupan yang menjadi minatnya, maka media massa pun memberikan isi yang beraneka ragam (Oetama, 1987 : 4).

Di dalam masyarakat modern manapun, pers memainkan peran penting untuk perkembangan politik masyarakatnya. Pers kerap disebut-sebut sebagai salah satu pilar demokrasi. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pesan merupakan dasar penting untuk sistem demokrasi yang dikeluarkan dalam semua dokumen hak asasi manusia yang dikeluarkan setelah Perang Dunia kedua (Sobur, 2009 : 32).

Peradaban masa kini lazim disebut sebagai "preadaban masyarakat informasi". Informasi menjadi suatu komoditi primer bahkan sumber kekuasaan karena informasi dapat dijadikan alat untuk membentuk pendapat publik (public opinion) yang mempengaruhi dan mengendalikan pikiran, sikap, dan perilaku manusia (Romli, 2003 : 13).

Ada pendapat, sumber baru kekuasaan sekarang adalah informasi di tangan banyak orang (*the new source of power is information in the hand of many*) dan siapa yang menguasai media massa dialah pengendali dan penguasa dunia. Menurut Romli, di era informasi ini, arus informasi dunia dikuasai dan dikendalikan kaum kuffar yang memandang Islam sebagai musuh yang harus dihancurkan. Mereka adalah kaum Salibis dan Zionis Internasional. Melakukan semacam "penjajahan informasi" dan "penjajahan media massa". Merekalah yang mengangkat isu-isu global demi kepentingan mereka sendiri.

Sedangkan umat Islam tidak memiliki suatu media massa yang memadai untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam atau membela kepentingan agama dan umat Islam. Akibatnya, yang terjadi tidak hanya kurang tersalurkannya aspirasi umat, tetapi juga umat Islam hanya menjadi konsumen dan rebutan media massa lain yang tak jarang membawa informasi yang menyesatkannya (Romli, 2003 : 14).

Umat Islam kini dididik oleh media massa yang tidak islami. Akibatnya, umat dikuasai nilai-nilai budaya sekularisme atau non-Muslim. Sistem ekonomi dan sosial budaya dikuasai kelompok-kelompok sekuler.

Akibat lain, emdia cetak yang laris hanyalah media yang bercirikan sekulerisasi dalam wujudnya (Romli, 2003 : 15).

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, sedangkan media elektronik yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah televisi dan radio (Ardianto & Erdiyana, 2004 : 98). Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada media massa cetak yang berbentuk surat kabar.

2.2 Surat Kabar

Berbicara tentang surat kabar, kata Agee sebagaimana dikuti Ardiyanto dan Komala, orang akan tertuju kepada Sunday Time yang terbit di New York, dengan oplah nasional setiap minggunya. Koran-koran dengan sirkulasi nasional ini dikenal dengan surat kabar metropolitan, yang selain terbit di New York, terdapat pula di Washington, Chicago, Los Angeles (Ardianto & Erdiyana, 2004 : 97).

2.2.1. Karakteristik Surat Kabar

Karakteristik dari surat kabar adalah sebagai berikut :

1. Publisitas; surat kabar itu diperuntukkan untuk umum, karenanya berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain harus menyangkut kepentingan umum (Uchjana, 2006 : 154).

2. Universalitas ; surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia (Uchjana, 2006 : 154).
3. Aktualitas ; merupakan kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak (Uchjana, 2006 : 155)
4. Periodesitas ; artinya pers harus secara teratur, periodik, misalnya setiap hari, seminggu sekali, dua minggu sekali, satu bulan sekali, atau tiga bulan sekali (Sumadiria, 2006 : 36).
5. Objektivitas ; merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya (Rachmadi, 1990 : 5).

Demikianlah karakteristik dari surat kabar yang membedakan dengan media massa lainnya. Dari karakteristik tersebut dapat diketahui bahwa media massa cetak (surat kabar) harus selalu berpegang teguh pada identitas dirinya, karena dari karakteristik itulah lahir sebuah identitas.

2.2.2. Fungsi Surat Kabar

Dalam berbagai literatur komunikasi dan jurnalistik disebutkan terdapat lima utama fungsi surat kabar (pers) yang berlaku universal. Disebut universal, karena kelima fungsi tersebut dapat ditemukan pada setiap negara di dunia yang menganut paham demokrasi, yakni :

Fungsi pertama pers adalah menyampaikan informasi (*to inform*) secepat-cepatnya kepada masyarakat (Sumadiria, 2005 : 32). Fungsi kedua adalah *to educate*. Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar dan majalah memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya (Uchjana, 2006 : 149)

Fungsi ketiga adalah sebagai koreksi (*to influence*), artinya pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Sumadiria, 2005 : 33). Fungsi keempat pers adalah menghibur. Pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat.

Fungsi pers yang terakhir adalah mediasi yang artinya penghubung. Bisa juga disebut fasilitator atau mediator. Sehingga dengan fungsi ini, diharapkan pers mampu menghubungkan tempat satu dengan tempat lain, peristiwa satu dengan yang lain dan sebagainya (Sumadiria, 2005 : 34).

Dari beberapa fungsi media massa tersebut, fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Karenanya sebagian besar rubrik surat kabar terdiri dari berbagai jenis berita (Ardianto & Erdiyana, 2004 : 104).

2.3 Berita

2.3.1. Pengertian Berita

Berita berasal dari bahasa *Sansekerta*, yaitu *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *write*, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan *Vritta*, artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita atau warta. Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta “berita” berarti kabar atau warta, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelaskan menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Jadi berita dapat dikaitkan dengan kejadian/peristiwa yang terjadi (Djuroto, 2004 : 46).

Para ahli publisistik dan jurnalistik memang belum ada yang mampu mendefinisikan berita secara khusus dan bisa diterima secara umum. Namun secara sederhana para pakar jurnalistik mendefinisikan berita sebagai apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi (Sumadiria, 2005 : 63).

Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Pendapat lain dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, ia mengatakan bahwa berita adalah sesuatu yang aktual yang dipilih oleh

wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena ia dapat menarik/mempunyai makna bagi pembaca (Djuroto, 2004 : 46).

Sedangkan, berita menurut Haris Sumadiria adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *on line* internet (Sumadiria, 2005 : 65).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berita bukan hanya merujuk pada pers atau media massa dalam arti sempit dan “tradisional” melainkan juga pada radio, televisi, film, internet atau media massa dalam arti luas dan modern.

2.3.2. Jenis – jenis berita

Dalam dunia jurnalistik, berita berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu *elementary*, *intermediate*, dan *advance*. Berita *elementary* mencakup berita langsung (*straight news*), berita mendalam (*depth news report*), dan berita menyeluruh (*comprehensive news report*). Berita *intermediate* meliputi pelaporan berita interpretatif (*interpretative news report*), dan pelaporan karangan khas (*feature story report*). Sedangkan untuk kelompok *advance* menunjuk pada pelaporan mendalam (*depth reporting*), pelaporan penyelidikan (*investigative reporting*), dan penulisan tajuk rencana (*editorial writing*) (Sumadiria, 2005 : 69).

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa jenis berita tersebut yang telah dikutip Sumadiria dari Rivers.

1. *Straight news report*

Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Biasanya, jenis berita ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari *what, who, when, where, why, dan how* (5W + 1H). Misalnya pemberitaan tentang seminar.

2. *Depth news report*

Depth new report merupakan yang sedikit berbeda dengan *straight news report*. Reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter. Fakta-fakta yang nyata masih tetap besar.

3. *Comprehensive news report*

Comprehensive news report merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas (Sumadiria, 2005 : 69)

4. *Interpretative report*

Berita intepretatif biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian,

fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Laporan interpretatif biasanya untuk menjawab pertanyaan mengapa.

5. Feature story

Dalam berita berbentuk *feature*, reporter mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya, tidak begitu menyajikan informasi yang penting untuk pembacanya. Penulis *feature* menyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya (*style*) penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

6. Depth reporting

Depth reporting merupakan pelaporan jurnalsitik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul untuk menghindari kejemuhan pembaca (Sumadiria, 2005 : 70).

7. Investigative reporting

Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Namun demikian, dalam laporan investigasi, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.

8. *Editorial writing*

Editorial writing merupakan pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum (Sumadiria, 2005 : 71).

2.3.3. Kriteria umum nilai berita

Secara detail nilai-nilai berita (*news value*) tersebut antara lain :

1. Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (*news*) yakni sesuatu yang baru (*new*) (Romli, 2005 : 5)
2. Nyata (*faktual*), yaitu informasi tentang segala fakta (*fact*) bukan fiksi atau karangan. Dalam pengertian ini juga terkandung pengertian bahwa sebuah berita harus mempunyai informasi tentang sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. Penting, artinya menyangkut kepentingan banyak orang. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan pemerintah, kenaikan harga, dan lain-lain (Romli, 2005 : 6)
4. Kedekatan (*proximity*) ; Stieler dan Lippmann, sebagaimana dikutip Kusumaningrat menyebutkan bahwa maksudnya adalah kedekatan secara geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus dalam

pengertian fisik seperti yang disebutkan Stieler dan Lippmann, tetapi juga kedekatan emosional (Kusumaningrat, 2005 : 62)

5. Keterkenalan (*prominence*) ; berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang ternama, tersohor, selebriti, figur publik. Orang-orang penting, orang-orang terkemuka, dimana pun selalu membuat berita.
6. Akibat (*impact*) ; berita adalah sesuatu yang brdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat (Sumadiria, 2005 : 82).
7. *Human Interest* ; dalam berita, hendaknya terkandung unsur yang menarik empati, simpati, atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya (Kusumaningrat, 2005 : 64)
8. Konflik (*conflict*) ; berita adalah konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur atau sarat dengan dimensi pertentangan. Konflik atau pertentangan, merupakan sumber berita yang tak pernah kering dan tak akan pernah habis (Sumadiria, 2005 : 87). Meskipun terdapat perbedaan istilah dan penekanan di antara para ahli komunikasi dan media massa, umumnya nilai berita tersebut berlaku universal. Berlaku di seluruh dunia.

2.4. Berita dan wacana

Eriyanto mengatakan bahwa independen dan objektif, merupakan dua kata kunci yang menjadi kiblat dan klaim setiap jurnalis di seluruh dunia.

Seorang jurnalis selalu menyatakan dirinya telah bertindak objektif, seimbang dan tidak berpihak pada kepentingan apapun kecuali keprihatinan atas hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran (Eriyanto, 2004 : v).

Ia menambahkan bahwa meskipun sikap independen dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis, pada kenyataannya kita sering kali mendapatkan suguhan berita yang beraneka warna dari sebuah peristiwa yang sama. Maka, dengan membandingkan beberapa pemberitaan media, sangat mungkin kita akan menemukan kesimpulan yang setara, bahwa media apapun tidak bisa lepas dari bias-bias, baik yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan agama. Tidak ada satupun media yang memiliki sikap independensi dan objektivitas yang absolut (Eriyanto, 2004 : vi).

Dalam kerangka pembentukan opini publik, media massa umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus. Ibnu Hamad, sebagaimana dikutip Hafizoh menulis, pertama media massa menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*), kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*), dan ketiga, adalah melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Ketika melakukan ketiga tindakan tersebut, media massa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal (Hafizoh, 2007 : 39).

Faktor internal seperti tekanan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan kekuatan politik tertentu. Sedangkan faktor eksternal seperti tekanan

pasar pembaca maupun pemirsa, sistem kekuasaan yang berlaku dan kekuatan-kekuatan luar lainnya.

Suatu peristiwa tertentu dapat menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan ketiga tindakan tersebut. Oleh karenanya, dengan adanya kemungkinan perbedaan pembentukan opini publik oleh masing-masing media, dapat dikatakan bahwa realitas yang dibawa media massa ke tengah masyarakat bisa jadi bukanlah realitas yang sebenarnya, tapi realitas bentukan/rekayasa (Hafizoh, 2007 : 40).

Oleh karenanya, sebagai muslim harus mampu memfilter dan memilah-milah berita yang ditulis media massa. Sebab ada banyak kemungkinan berita yang ditulis media tersebut adalah rekayasa belaka, yang mana jikalau dianut justru menimbulkan kesalahan penafsiran.

Asep Syamsul Romli mengatakan bahwa salah satu masalah besar umat Islam pada era informasi sekarang ini adalah tidak dimiliknya suatu media massa yang memadai bagi mereka, untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam atau membela kepentingan agama dan umat Islam. Akibatnya, yang terjadi tidak hanya kurang tersalurkannya aspirasi umat, tetapi tidak jarang membawa informasi yang menyesatkan bagi mereka (Romli, 2005 : 113).

Ia menambahkan bahwa, umat Islam kini dididik oleh media massa yang tidak islami. Akibatnya, umat dikuasai nilai-nilai budaya sekularisme atau non-muslim. Sistem ekonomi dan sosial budaya dikuasai kelompok-

kelompok sekuler. Akibat lain, media cetak yang laris hanyalah media cetak yang bercirikan sekulerisasi dalam berbagai wujudnya (Romli, 2003 : 15).

Banyak rekayasa dalam pemberitaan suatu media. Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan penafsiran, dibutuhkan suatu alat untuk menganalisis teks tersebut. Salah satu pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis wacana.

Alex Sobur mengatakan bahwa sudah sepatutnya wacana dihubungkan dengan bahasa, alasannya adalah karena bahasa mempunyai kesanggupan untuk menyajikan berbagai bentuk model bagi kajian sosial budaya. Istilah wacana sekarang ini dipakai sebagai terjemahan dari perkataan bahasa Inggris *discourse*. Kata *discourse* berasal dari bahasa Latin diskursus yang berarti lari kian kemari (yang diturunkan dari *dis*-‘dari, dalam arah yang berbeda’, dan *curere* ‘lari’) (Sobur, 2009 : 9).

Foucault, sebagaimana dikutip Eriyanto berpendapat bahwa wacana kadangkala sebagai bidang dari semua pernyataan (*statement*), kadangkala sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan (Eriyanto, 2001 : 2).

Definisi wacana yang lebih sederhana menurut Lull, seperti dikutip Eriyanto adalah cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas (Sobur, 2009 : 11).

Penelitian ini memakai pandangan kristis. Dalam analisis wacana kristis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) wacana disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana- pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan- sebagai bentuk dari praktek social. Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi (Eriyanto, 2001 : 7).

Salah satu sifat dasar dari teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi masyarakat dewasa ini, karena kondisi masyarakat yang kelihatannya produktif, dan bagus tersebut sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan menipu kesadaran khalayak (Eriyanto, 2001 : 24)

Mengutip Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis. Bahasa ini diambil dari tulisan Teun A. VanDijk, Fairclough, dan Wodak.

1. Tidakan

Wacana dapat dipahami sebagai tindakan (*actions*) yaitu mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Seseorang berbicara, menulis, menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Wacana dalam prinsip ini, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan apakah untuk mendebat, mempengaruhi, membujuk,

menyangga, bereaksi dan sebagainya. Selain itu wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol bukan sesuatu di luar kendali atau diekspresikan secara sadar (Eriyanto, 2001 : 8)

2. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang diproduksi dan dimengerti dan dianalisis dalam konteks tertentu. Guy Cook menjelaskan bahwa analisis wacana memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; khalayaknya, situasi apa, melalui medium apa, bagaimana, perbedaan tipe dan perkembangan komunikasi dan hubungan masing-masing pihak. Tiga hal sentralnya adalah teks (semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak dilembar kertas, tetapi semua jenis ekspresi komunikasi). Konteks (memasukan semua jenis situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, situsai dimana teks itu diproduksi serta fungsi yang dimaksudkan). Wacana dimaknai sebagai konteks dan teks secara bersama. Titik perhatiannya adalah analisis wacana menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam proses komunikasi (Eriyanto, 2001 : 10)

3. Historis

Yang dimaksud dalam karakteristik ini adalah menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu. Berarti wacana diproduksi dalam konteks dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang

menyertainya. Oleh karena itu, pada waktu melalukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya.

4. Kekuasaan

Analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan. Wacana dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan yang dimaksudkan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Bentuk kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-macam, bisa berupa kontrol atas konteks, selain itu kontrol juga diwujudkan dalam bentuk mengontrol struktur wacana (Eriyanto, 2001 : 11).

5. Ideologi

Ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam analisis wacana kritis karena setiap bentuk teks, percakapan dan sebagainya adalah praktik ideologi atau pancaran ideologi tertentu. Wacana bagi ideologi adalah medium melalui mana kelompok dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak kekuasaan yang mereka miliki sehingga absah dan benar. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif jika didasarkan pada kenyataan bahwa anggota komunitas termasuk yang

didominasi menganggap hal tersebut sebagai kebenaran dan kewajaran (Eriyanto, 2001 : 13).

Teun A. Van Dijk mengatakan bahwa ideologi terutama dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. Dalam perspektif ini, ideologi mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, ideologi secara *inheren* bersifat sosial, tidak personal atau individual ; ia membutuhkan *share* diantara anggota kelompok, organisasi atau kolektivitas dengan orang lainnya. Kedua, ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal diantara anggota kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya menyediakan fungsi koordinatif dan kohesi tetapi juga membentuk identitas diri kelompok, membedakan dengan kelompok lain (Eriyanto, 2001 : 14).

Oleh karena itu, analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks, terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana.

Ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam kemajuan analisis media melalui wacana ini. Salah satunya adalah Teun A. van Dijk, seorang profesor dari Universitas Amsterdam. Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh beberapa ahli, barangkali model Teun A. van Dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Hal ini kemungkinan karena van Dijk mengelaborasi elemen-

elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis.

Model yang dipakai oleh van Dijk ini sering disebut sebagai “kognisi sosial”.

Menurut van Dijk, seperti dikutip Eriyanto penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus diamati. Di sini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu (Eriyanto, 2001 : 221).

Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan : teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur/tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung, ia membagi dalam tiga tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan, sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah (Eriyanto, 2001 : 224).

Adapun penjelasan dari tiga tingkatan dalam dimensi teks menurut van Dijk adalah sebagai berikut :

1. Struktur Makro

Struktur makro merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya (Eriyanto, 229).

Menurut van Dijk, seperti dikutip Sobur, dari topik kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil oleh komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan, atau pendapat dapat diamati pada struktur makro dari suatu wacana. Topik akan di dukung oleh beberapa sub-topik. Masing-masing sub topik ini mendukung, memperkuat, bahkan membentuk topik utama. (Sobur, 2009 : 76).

Gagasan van Dijk ini didasarkan pada pandangan ketika wartawan meliput suatu peristiwa dan memandang suatu masalah didasarkan pada suatu mental/pikiran tertentu. Kognisi atau mental ini secara jelas dapat dilihat dari topik yang dimunculkan dalam berita. Karena topik disini dipahami sebagai mental atau kognisi wartawan, makanya tak heran jika semua elemen dalam berita mengacu dan mendukung topik dalam berita (Eriyanto, 2001 : 231).

2. Superstruktur

Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan hingga membentuk kesatuan arti (Eriyanto, 2001 : 232).

Arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian itu dengan menempatkan dibagian akhir agar terkesan kurang menonjol (Eriyanto, 2001 : 234).

3. Struktur mikro

Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, *paraphrase*, dan gambar. Ada empat hal yang diamati dalam struktur mikro ini, yaitu semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris.

a. Semantik

Semantik adalah makna yang ingin ditekankan dalam teks.

Dalam studi linguistik konvensional, makna kata dihubungkan dengan arti yang terdapat dalam kamus, sedangkan dalam analisis

wacana, makna kata adalah praktik yang ingin dikomunikasikan sebagai suatu strategi.

Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (*local meaning*), yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, hubungan antarproposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu bagunan teks. Semua strategi semantik selalu dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau kelompok sendiri secara positif, sebaliknya menggambarkan kelompok lain secara buruk, sehingga menghasilkan makna yang berlawanan (Sobur, 2009 : 78).

Ada beberapa elemen yang diamati dalam semantik ini, yaitu latar, detil, maksud, praanggapan, dan nominalisasi.

a.1. Latar

Latar merupakan elemen wacana yang dapat dijadikan alasan pemberar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Oleh karenanya, latar teks dapat digunakan untuk membongkar apa maksud yang ingin disampaikan wartawan (Eriyanto, 2001 : 235).

a.2. Detil

Berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang (komunikator). Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik (Eriyanto, 2001 : 238).

a.3. Maksud

Elemen maksud melihat apakah teks itu disampaikan secara eksplisit ataukah tidak. Umumnya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit dan tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah kepada publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan komunikator (Eriyanto, 2009 : 240).

a.4. Praanggapan

Praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. Ia merupakan fakta yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dijadikan dasar untuk mendukung gagasan tertentu (Eriyanto, 2001 : 256).

a.5. Nominalisasi

Berhubungan dengan pertanyaan apakah wartawan memandang objek sebagai suatu kelompok.

b. Sintaksis

Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari kata Yunani (*sun* = “dengan” + *tattein* = “menempatkan”). Sintaksis secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat (Sobur, 2009 : 80). Berkaitan dengan bagaimana pendapat disampaikan.

Elemen-elemen yang diamati antara lain bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti.

b.1. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Terdapat unsur subyek dan predikat dalam setiap kalimat. Bentuk kalimat ini menentukan apakah subyek diekspresikan secara eksplisit atau implisit di dalam teks berita (Sobur, 2009 : 81).

b.2. Koherensi

Webster, sebagaimana dikutip Sobur memberikan keterangan koherensi dengan dua pengertian, yaitu kohesi dan koneksi. Kohesi adalah perbuatan atau keadaan menghubungkan, mempertalikan. Sedangkan koneksi adalah hubungan yang cocok dan sesuai atau kebergantungan satu sama lain yang rapi, beranjak dari hubungan-hubungan alamiah bagian-bagian atau hal-hal satu sama lain, seperti dalam argumen suatu rentetan penalaran (Sobur, 2009 : 80).

Dalam analisis wacana, koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat. Dua buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan memakai koherensi, sehingga fakta yang

tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika komunikator menghubungkannya (Sobur, 2009 : 81).

b.3. Kata Ganti

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang dipakai komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana (Eriyanto, 2001 : 253).

c. Stilistik

Alex Sobur mengutip pendapat Panuti Sudjiman yang mengatakan bahwa pusat perhatian stilistika adalah *style*, yaitu cara yang digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian *style* dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa (Sobur, 2009 : 83). Elemen yang diamati dalam stilistik adalah leksikon.

Pada analisis wacana, leksikon pada dasarnya menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia (Eriyanto, 2001 : 255)

d. Retoris

Berkaitan dengan bagaimana cara wartawan *Seputar Indonesia* menyampaikan pendapat terhadap berita tentang pro dan kontra pemidanaan pelaku nikah *sirri*. Retoris mempunyai fungsi persuasif, dan berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu ingin

disampaikan kepada khalayak (Sobur, 2009 : 84). Elemen yang diamati meliputi grafis, metafora, dan ekspresi.

d.1. Grafis

Bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati dalam teks (Eriyanto, 2001 : 258).

d.2. Metafora

Berisi kata-kata berupa kiasan, ungkapan, metafora, yang dimaksudkan sebagai ornamen atau bumbu dari suatu teks. Akan tetapi pemakaian metafora tertentu bisa jadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks (Eriyanto, 2001 : 259).

d.3. Ekspresi

Bentuk intonasi komunikator yang dapat mensugestikan komunikasi untuk memperhatikan atau mengabaikan bagian tertentu, dalam sebuah pesan gagasan yang dikehendaki komunikator.

Selain meneliti teks, Teun van Dijk juga memberikan gagasan tentang kognisi sosial. Kognisi sosial terutama dihubungkan dengan proses produksi berita. Menurutnya, titik kunci dalam memahami produksi berita adalah dengan meneliti proses terbentuknya berita. Ia juga menambahkan bahwa produksi berita sebagian besar dan terutama terjadi pada proses mental dalam kognisi seorang wartawan (Eriyanto, 2001 : 266).

Analisis kognisi sosial menekankan, bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan dalam suatu model dalam memori. Model ini menggambarkan bagaimana : tindakan atau peristiwa yang domain, partisipan, waktu dan lokasi, keadaan, objek yang relevan, atau perangkat tindakan dibentuk dalam struktur berita. Wartawan menggunkana model untuk memahami peristiwa yang telah diliputnya. Model itu memasukkan opini, sikap, perspektif, dan informasi lainnya. Menurut van Dijk, sebagaimana dikutip Eriyanto, ada beberapa strategi besar yang dilakukan (Eriyanto, 2001 : 268).

Pertama, seleksi. Seleksi adalah strategi yang kompleks yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa, informasi diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan ke dalam berita. *Kedua*, reproduksi. Kalau strategi seleksi berhubungan dengan pemilihan informasi apa yang dipilih untuk ditampilkan, reproduksi berhubungan dengan apakah informasi dikopi, digandakan, atau tidak dipakai sama sekali oleh wartawan. *Ketiga*, penyimpulan berita. Penyimpulan ini berhubungan dengan bagaimana realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan diringkas. *Keempat*, transformasi lokal. Transformasi lokal berhubungan dengan bagaimana peristiwa akan ditampilkan, misalnya dengan penambahan (*addition*), atau dengan menggunakan perubahan urutan (*permutation*) (Eriyanto, 2001 : 269-270).

Dimensi ketiga dari analisis van Dijk adalah analisis sosial. Titik penting dari analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna

yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi. Menurut van Dijk sebagaimana dikutip Eriyanto, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua poin yang penting : kekuasaan (*power*) dan akses (*acces*) (Eriyanto, 2004 : 271).

2.5. Pernikahan *Sirri* di Indonesia

Saat ini masyarakat Indonesia ramai memperbincangkan tentang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan *sirri*, perkawinan kontrak, dan poligami. Pro dan kontra pun bergulir diantara masyarakat dan para ulama, pasalnya dalam RUU tersebut nyata-nyata terkandung klausul pemidanaan (kriminalisasi). Dengan kata lain bagi siapa saja yang melakukan nikah *sirri*, poligami dan juga kawin kontrak mereka bisa diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 bulan dan denda 5 juta rupiah.

2.5.1. Pengertian Nikah *Sirri*

Dilihat dari kata-katanya *sirri* itu berarti sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Pernikahan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan, pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan *sirri* atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya (Ma'ruf, <http://konsultasi.wordpress.com/>, akses 05/07/2010).

2.5.2. Merayakan Pernikahan

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Islam mensunahkan merayakan perkawinan agar dengan demikian terhindar dari nikah *sirri* (rahasia) yang dilarang itu dan untuk meluapkan rasa gembira atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Perkawinan wajar untuk dirayakan supaya dapat diketahui khalayak ramai, orang yang dekat ataupun jauh dan menjadi motivasi bagi yang lain supaya cepat menikah. Dengan demikian banyak orang yang menikah.

Ia menambahkan bahwa merayakan perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat, sebab setiap masyarakat mempunyai adatnya tersendiri. Akan tetapi merayakan perkawinan tidak boleh disertai hal-hal yang diharamkan, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas antara laik-laki dan perempuan dan sebagainya (Sabiq, 2006 : 121).

Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم : اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه الدفوف (رواه احمد والترمذى وحسنه)

“Rayakanlah pernikahan ini, adakanlah di masjid-masjid, dan dendangkanlah rebana pada waktu pesta perkawinan”.(HR Ahmad dan Tirmidzi, hadits hasan)

Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi tetapi harus dipublikasikan agar keluarga, tetangga dan handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan, diwalimahkan dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan beliau menganjurkan agar melaksanakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing.

Ada banyak hal-hal positif yang akan diterima ketika seseorang menyiarkan pernikahannya pada orang lain, *pertama*, untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat, *kedua*, memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksianya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai. *Ketiga*

adalah memudahkan mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum.

Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (*sirri*). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi *sirri* hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan *sirri* juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan *sirri* nya.

Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah (Ma'ruf, <http://konsultasi.wordpress.com/>, akses 05/07/2010).

2.5.3. Pencatatan Pernikahan

Perkawinan itu merupakan sebuah akad, kontrak, atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh undang-undang. Juga telah dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan

sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan (Nuruddin & Tarigan, 2004 : 119).

Ada beberapa hal mengapa pencatatan pernikahan tidak begitu dipermasalahkan dalam Islam. Pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.

Kedua, tradisi *walimatul ‘urs* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi *syar’i* tentang sebuah perkawinan dan ketiga ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan (Nuruddin & Tarigan, 2004 : 120).

Dengan alasan-alasan yang telah dibuat di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri

masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta (Nuruddin & Tarigan, 2004 : 121). Alasan inilah yang kemungkinan dijadikan acuan pemerintah untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku nikah *sirri*.

2.5.4. Kontroversi Pemidanaan Pelaku Nikah *Sirri*

Adanya rencana pemerintah yang hendak memidanaan pelaku nikah *sirri* inilah yang kemudian memicu kontroversi. Pertarungan wacana terkait pemidanaan pelaku nikah *sirri* pun menyeruak ke permukaan. Ada pihak-pihak yang mendukung pemidanaan pelaku nikah *sirri* dan ada pula pihak yang menolaknya.

Antropolog UNDIP, Mudjahirin Thohir, menilai fenomena kawin *sirri* yang dipraktikkan sebagian masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh budaya feodalistik dalam sejarah peradaban negeri ini. Menurutnya, budaya feodalistik zaman kerajaan itu sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia sehingga tidak mengherankan jika seorang laki-laki bisa memiliki istri lebih dari satu.

Antropolog ini menilai perkawinan *sirri* menciptakan celah untuk berbuat tidak adil, karena kawin *sirri* hanya menuntut pelakunya bertanggungjawab hanya pada Tuhan. Mudjahirin

menyetujui pemidanaan pelaku perkawinan *sirri* seperti disebut rancangan undang-undang (RUU) Peradilan Agama, sebagai pengingat bagi pelaku nikah *sirri*. Dia menepis anggapan bahwa negara telah memasuki wilayah privat manusia karena menurutnya negara berwenang mengatur manusia yang hidup dalam wilayahnya, namun tetap ada batasan-batasan tertentu (<http://www.antaranews.com/>, akses 13/11/'10).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD juga mendukung wacana pelarangan pernikahan *sirri* agar tidak terdapat korban akibat pernikahan jenis tersebut. Ia setuju kalau pelaku nikah *sirri* dikenai sanksi pidana, alasannya karena nikah *sirri* bisa membuat anak-anak terlantar dan istri pertama tidak mau mengakuinya. Selain itu menurut dia pihak laki-laki melakukan pernikahan *sirri* antara lain hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya saja (<http://oase.kompas.com>, akses 13/12/'10).

Berbeda dengan mereka, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Mutawakkil menyatakan jeratan pidana bagi pelaku nikah *sirri* bertentangan dengan syariah. Sesuai syariah Islam, persyaratan nikah itu harus ada wali, ijab kabul, mas kawin dan saksi, tanpa ada ketentuan dicatatkan di instansi pemerintah. Ia mengatakan bahwa syarat ini dibenarkan oleh semua madzhab. Ia khawatir kalau RUU ini disahkan menjadi UU akan menuai protes luar biasa dari masyarakat serta menimbulkan azab

yang besar. Azab itu bisa terjadi karena hukum negara sudah bertolak belakang dan menetang hukum agama (<http://www.oase.kompas.com>, akses 13/12/'10).

Adam Ibrahim, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Bogor juga menolak langkah pemerintah yang berencana memidanakan pelaku nikah *sirri*. Alasan penolakannya adalah karena nikah *sirri* dalam ajaran Islam sudah sah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan itu antara lain adanya pengantin, wali, dan saksi pernikahan. Adam juga mengatakan bahwa nikah *sirri* merupakan masalah manusiawi dan pemerintah hendaknya mengatur sanksi terhadap praktik *kumpul kebo* yang marak saat ini (<http://www.megapolitan.kompas.com>, akses 13/12/'10).

Dari pendapat beberapa tokoh di atas agaknya terlihat ideologi-ideologi yang mereka anut. Dari pihak pro sendiri menganggap RUU tersebut diperlukan agar perempuan tidak menjadi korban dalam pernikahan *sirri*, karena hal itu biasanya dilakukan hanya sebuah ‘kedok’ dari perzinaan terselubung. Penulis mengambil kesimpulan bahwa ideologi pihak yang mendukung adalah feminism. Dari pernyataan-pernyataannya, mereka mengatasnamakan membela hak perempuan yang menurutnya merupakan pihak yang paling dirugikan dalam kasus nikah *sirri* di Indonesia.

Selain pihak yang mendukung adanya pemidanaan pelaku nikah *sirri*, pihak kontra RUU pun bereaksi keras dan menolak

mentah-mentah. Hal ini dikarenakan menurut mereka pernikahan adalah urusan agama dan bersifat privat, jadi tidak perlu intervensi negara. Pihak yang menolak ini berideologi antifeminism, karena meskipun mereka juga membela hak perempuan namun dari pernyataan-pernyataannya yang lebih ditonjolkan bukan mengenai hak perempuan akan tetapi lebih condong ke agama, bahwa pernikahan bersifat privat.

Pernikahan bersifat privat yang dimaksudkan di sini adalah bahwa sebenarnya hak manusia yang paling mendasar adalah hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk di dalamnya, kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama yang dianut. Nikah *sirri* termasuk bagian dari ekspresi menjalankan menjalankan kepercayaan agamanya.

Walaupun saat ini nikah *sirri* sedang marak dibicarakan, bahkan terjadi beda pendapat mengenai RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Pernikahan yang akan memidanakan pelaku nikah *sirri*, mungkin dalam suatu kasus, *sirri* itu dianggap perlu, karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, bagi pihak suami atau pihak istri. Artinya, nikah *sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu *mudharat* apabila nikah itu cepat-cepat dipublikasikan secara terbuka.

Kebolehan nikah *sirri* (dalam pengertian di atas) itu mestinya hanya bersifat sementara karena pertimbangan-pertimbangan

kemaslahatan bersama dan selanjutnya handaklah dipublikasikan.

Akan tetapi kalau nikah *sirri* yang dimaksudkan adalah nikah tanpa wali atau tanpa saksi, maka nikah *sirri* tersebut tidak sah (Faridl, 1999 : 55).